ANALISIS YURIDIS PENYALAHGUNAAN *UNMANNED COMBAT AERIAL VEHICLE* (COMBAT DRONE) SEBAGAI SENJATA PERANG DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Oleh : ROY FALDI ANPRATAMA

Pembimbing I : Dr. Evi Deliana, HZ, SH., L.L.M

Pembimbing II : Widia Edorita SH., MH

Email : Royfaldi97@gmail.com

Telepon : 08536022666

ABSTRACT

The development of the use of weapons technology is currently growing rapidly darting. One of them is the use of technology Unmanned Aerial Vehicle (UAV) / Drone (aircraft without crew) controlled through a remote control which is used as a weapon into Unmanned Combat Aerial Vehicles (UCAVs) Combat Drones (unmanned aircraft equipped with weapons) which some countries are very meaningful to minimizing risk in conflict weapon since only be controlled remotely and claimed can fly up to tens of hours is on one hand very lucrative military field.

On the other hand, the impact from the use of these drones should also be noted, because the resulting impact very seriously and according to some legal experts that the use of armed drones (Combat Drone) violates human rights and legal humanitarian. One of the example is the impact of such attacks deprive the lives of many people, like the case of the American drone attacks in Pakistan since 2004 to 2018 according to the humanitarian agency International bureau of investigates has killed over 4,026 souls therein 2.515- including civilians and children due to their use in targeting attacks are indiscriminate.

From the results obtained, as the development of weapons such as Combat Drone technology, use of drones as weapons should be formulated in a particular legal seal the document. Therefore, countries that are currently using drone technology should agree to establish the rule of law, so that there is no legal vacuum in the regulation on the use of drones especially relating to its use as a weapon in armed conflict. The formulation of the rule of law should also pay attention to international humanitarian law. Because if not defined, it is very difficult for the state to define the limits associated used such weapons look very bad impact produced in the humanitarian field.

Keywords: - Drone - Unmanned Combat Drone - Law Enforcement - Internaisonal Humanitarian Law - Legal – Accountability

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perang adalah sebuah kondisi yang sangat sulit untuk dihilangkan. Upaya untuk menghapus perang dari muka bumi tidak mungkin berhasil dilakukan. Namun yang dapat dilakukan adalah mengurangi penderitaan yang diakibatkan oleh perang dengan cara mengatur perang dengan sebuah aturan/hukum. Hukum yang dimaksud adalah hukum humaniter atau yang dahulu dikenal dengan hukum perang.¹ Aturan-aturan didalam hukum internasional, terkhusus dibidang hukum humaniter internasional terkait ketentuan-ketentuan dalam berperang atau dalam keadaan konflik, seringkali tidak ditaati oleh sejumlah Negara, yang berpotensi mengancam nyawa banyak pihak yang seharusnya dilindungi menurut hukum internasional di wilayah terjadinya konflik tersebut.

Berdasarkan pengaturan dalam Pasal 36 Protokol Tambahan I tahun 1977: "Dalam penelitian pengembangan dan akuisisi, atau adopsi senjata baru, cara atau metode berperang, pihak perjanjian tinggi berkewajiban untuk menentukan apakah pekerjaannya akan, dalam beberapa atau semua keadaan, dilarang oleh protokol ini atau oleh setiap aturan hukum internasional lainnya yang berlaku

¹ Mochtar Kusumaatmadja, dalam Arlina Permanasari, Aji Wibowo, *Pengantar Hukum Humaniter Internasional* International Committee Of The Red Cross, Jakarta, 1990, hal.5

untuk pihak peserta agung."² Salah satunya adalah penyalahgunaan *Unmanned Combat Aerial Vehcles/Combat Drone* (yang selanjutnya dalam tulisan ini akan disebut dengan *UCAVS/Combat Drone*), oleh beberapa Negara yang tanpa menaati aturan hukum internasional yang berdampak pada banyak korban akibat dari *Combat Drone (UCAVs)* tersebut. AS telah melakukan ratusan serangan pesawat tak berawak *Combat Drone (UCAVs)* yang mematikan, setidaknya di lima negara (Afganistan, Pakistan, Libya, Yaman, dan somalia). Amerika Serikat telah meluncurkan operasi *Combat Drone (UCAVs)* ke Negara Pakistan sebanyak 430 serangan terhitung sejak 2004 hingga 2018). Dalam ratusan serangan ini telah menewaskan sebanyak 2.515- 4.026 orang, diantaranya sebanyak 424 – 969 warga sipil dan 172-207 anak-anak terbunuh dalam serangan *Combat Drone (UCAVs)* tersebut. Pemerintah Pakistan menganggap bahwa serangan *Combat Drone (UCAVs)* Amerika Serikat tersebut telah melanggar kedaulatan negara mereka.³

Tindakan ini menimbulkan kontroversi internasional dimana tindakan ini

² Terjemahan bebas pasal 36 Protokol Tambahan I 1977

³<https://www.thebureauinvestigates.com/project/CombatDrone-war/data/obama-2012pakistan-strikes> diakses tanggal 4 april 2019

dianggap melanggar hukum humaniter internasional, yaitu terkait pada negara yang melakukan serangan *Combat drone (UCAVs)* menjustifikasikan aksinya dengan mengacu pada tindakan membela diri yang inheren (tanpa menerima persetujuan atau otoritas dari dewan keamanan PBB terlebih dahulu), hal ini menimbulkan resiko menjadi tindakan agresi.⁴ Selain secara dramatis memperluas operasi pesawat tak berawak, presiden trump dilaporkan telah mencabut persyaratan yang telah dibuat sejak era barrack obama yang diberlakukan bagi badan intelijen CIA, yang di era presiden obama badan CIA harus merilis laporan tahunan mengenai jumlah korban tewas warga sipil akibat dari serangan *Combat drone (UCAVs)* amerika, yang saat ini telah dicabut oleh Donald Trump sehingga badan CIA tidak perlu merilis lagi laporan tahunan jumlah Korban akibat dari serangan *UCAVs/Combat Drone*, yang mengakibatkan hilangnya transparansi korban dalam serangan tersebut⁵. Penghapusan tersebut dapat mengakibatkan penggunaan pesawat

⁴ Tindakan kualifikasi sebagai tindakan Agresi menurut Resolusi Majelis Umum PBB 3314(XXIX) 14 desember 1974

⁵ Dikutip dari <https://www.voaindonesia.com/a/trump-cabut-perpres-pelaporan-korban-sipil-yang-tewas-dalam-operasi-intelijen/4816917.html> diakses tanggal 08 april 2019

Combat drone (UCAVs) dan kekuatan mematikan di laur negeri, yang kemungkinana akan meningkatkan resiko pembunuhan diluar hukum dan ancaman terhadap Warga sipil tanpa harus bertanggungjawab. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menguraikan pembahasan mengenai **“Analisis Yuridis Penyalahgunaan *Unnamed Aerial Combat Vehicles (Combat Drone)* sebagai senjata dalam Perang Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan penggunaan *Unmanned Combat Aerial Vehicles / Combat drone (UCAVs)* menurut Hukum Humaniter Internasional ?
2. Bagaimana dampak dari penggunaan *Unmanned Combat Aerial Vehicle / Combat drone (UCAVs)* di wilayah konflik?
3. Bagaimana Tanggung Jawab Negara asal Pelaku Pengguna Senjata *Combat drone (UCAVs)* Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

adalah untuk membantu dalam mengetahui pegenai pembahasan tentang apa saja yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini

yaitu :

- a. Agar diketahui tentang pengaturan penggunaan *Unmanned Combat Aerial Vehicle / Combat drone(UCAVs)* dalam perang yang diatur dalam Hukum Humaniter Internasional.
- b. Agar diketahui dampak dari penggunaan *Unmanned Combat Aerial Vehicle / UCAVs/Combat drone* dalam wilayah Konflik
- c. Untuk diketahuinya tentang tanggung jawab Negara asal Pelaku Pengguna senjata *Combat drone(UCAVs)* berdasarkan Hukum Humaniter Internasional.

2. Kegunaan Penelitian

Selain tujuan tersebut, juga perlu diketahui mengenai manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis (Ilmiah)
Penelitian ini dapat membantu menambah bahan pengetahuan hukum Humaniter Internasional secara umum maupun Hukum Humaniter Internasional secara khusus. Dapat pula dijadikan dasar bagi penelitian selanjutnya pada bidang yang sama.
- b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan tentang tinjauan yuridis atas hukum Humaniter Internasional terkait dengan legalitas

penggunaan *Combat drone(UCAVs)* dalam perang serta bentuk pertanggungjawaban Negara pelaku penyalahgunaan *Combat drone(UCAVs)* berdasarkan hukum humaniter Internasional.

D. Kertangka Teori

1. Teori Perang yang adil (Just War)

Perang yang adil atau just war dalam Hukum Humaniter muncul pada saat adanya gagasan dalam membedakan antara perang yang sah (*bellum iustum*) dan perang yang tidak sah (*bellum iniustum*).⁶ St. Augustine berpandangan bahwa suatu perang dianggap adil (*just war* atau *bellum iustum*), apabila memenuhi berbagai kriteria sebagai berikut:⁷ dilakukan berdasarkan sebab yang sah; dilakukan dengan maksud yang benar; dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk menggunakan kekerasan senjata; dilakukan sebagai sarana terakhir; dan dilakukan dengan tujuan akhir menciptakan perdamaian.

⁶ Arie Siswanto, *Hukum Pidana Internasional*, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2015, hlm. 218.

⁷ St. Augustine, dalam Arie Siswanto, *Ibid.*, hlm. 219.

2. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Makna dari tanggung jawab ialah kesediaan dasariah untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Roscoe Pound mengemukakan bahwa pertanggungjawaban adalah akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, baik dalam bentuk penyerangan maupun dalam bentuk persetujuan.⁸ Berikut ini merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum dalam Hukum Internasional yang antara lain sebagai berikut:

- a. Tanggung Jawab Negara
Tanggung jawab negara dalam Hukum Internasional, dilatarbelakangi pemikiran bahwasanya tiada satupun negara yang dapat menikmati haknya tanpa menghormati hak-hak negara lain. Rosalyn Higgins berpandangan bahwa, hukum tentang tanggung jawab negara tidak lain merupakan hukum yang mengatur akuntabilitas terhadap suatu pelanggaran Hukum Internasional.⁹

⁸ Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 110.

⁹ Sefriani, Hukum Internasional Suatu Pengantar, Edisi Kedua, Cetakan ke-6, PT.

- b. Tanggung Jawab Komando Berdasarkan Hukum Humaniter, doktrin tanggung jawab komando didefinisikan sebagai tanggung jawab komandan militer terhadap kejahatan perang yang dilakukan oleh prajurit bawahannya atau orang lain yang berada dalam pengendaliannya.

E. Kerangka Konseptual

konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan konsep konsep khusus yang ingin atau akan di teliti. Agar tidak terjadi kerancuan dalam mendefinisikan arti dan maksud dari judul penelitian ini, maka diberika konsep konsep yang meliputi hal hal sebagai berikut :

1. Analisis Yuridis secara linguistik adalah kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah bahasa guna meneliti struktur bahasa tersebut secara mendalam. Sedangkan pada kegiatan laboratorium, kata analisa atau analisis dapat juga berarti kegiatan yang dilakukan di laboratorium untuk memeriksa kandungan suatu zat dalam cuplikan.
2. Penggunaan adalah cara, perbuatan menggunakan sesuatu.
3. Hukum humaniter internasional adalah hukum yang mengatur

RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 254.

mengenai konflik bersenjata baik yang bersifat internasional maupun non-international

4. *Drone* adalah pesawat yang di desain untuk terbang tanpa pilot manusia di dalamnya menggunakan Aerodinamika untuk mengangkat dirinya, bisa digunakan kembali dan mampu membawa muatan baik senjata maupun muatan lainnya).¹⁰.
5. *Combat drone/UCAVs* adalah sebuah pesawat yang tidak membawa pilot manusia, menggunakan tenaga aerodinamik untuk mengangkatnya naik, bisa terbang secara otomatis atau di kontrol dengan pengendali, dapat digantikan atau diperoleh kembali, dan dapat membawa muatan berupa senjata ataupun barang bawaan selain senjata. Balistik, misil dan projektil artileri tidak dapat disebut Combat drone(UCAVs).¹¹
6. Pembunuhan Yang Ditargetkan (*Targetted Killings*) yaitu tindakan menggunakan kekuatan mematikan yang dilakukan Negara di masa damai atau selama konflik bersenjata untuk melenyapkan

individu-individu tertentu di luar tahanan mereka.¹²

7. Objek sipil adalah semua objek yang bukan sasaran militer adalah objek yang sifatnya, letak tempatnya, tujuannya atau kegunaannya memberikan sumbangan yang efektif bagi aksi militer yang jika dihancurkan secara menyeluruh atau sebagian direbut atau dinetralisasi, di dalam keadaan yang ada pada waktu itu, memberikan suatu keuntungan militer yang pasti.¹³

F. Metode penelitian

1. **Jenis dan Sifat Penelitian**
Penelitian ini apabila dilihat dari jenisnya merupakan penelitian yuridis normatif, dapat disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.¹⁴ Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen dan perbandingan hukum, yakni suatu metode perbandingan dengan memakai unsur-unsur sistem hukum sebagai

¹²Targetted Killing ,Council Of Foreign Relation, [Http://Www.Cfr.Org/Backgrounder/Targetted-Killings](http://www.Cfr.Org/Backgrounder/Targetted-Killings).

¹³ Pasal 52 Ayat (2) Protokol Tambahan 1 1977.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm 23

¹⁰ *Canadian Aviation Regulations* 1996, Reg 101.1

¹¹ United States Departement of Defense, *Dictionary of Military and Associated Terms*, 2001, hlm 563.

titik tolak perbandingan, serta menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif, yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Penelitian ini tergolong deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menganalisis masalah yang dikemukakan yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara kongkret terhadap kenyataan yang diteliti oleh peneliti tentang “analisis yuridis penyalahgunaan *Unmanned Combat Aerial Vehicles (UCAVS)*/ Combat Drone dalam konflik bersenjata ditinjau dari hukum humaniter internasional.

2. Sumber Data

Penelitian hukum normatif sumber datanya adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) :

a. Bahan Hukum Primer

merupakan data yang diperoleh penulis dari hasil menelusuri perpustakaan dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, traktat, buku-buku, literatur, jurnal, dan pendapat para ahli lainnya. data

primer adalah data yang digunakan dalam penulisan adalah :

1. Konvensi-Konvensi Den Haag 1907, merupakan ketentuan hukum humaniter yang mengatur cara dan alat berperang.
2. Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur mengenai perlindungan korban perang,
3. Protokol Tambahan I tahun 1977 yang mengatur tentang Perlindungan Korban Sengketa Bersenjata Internasional.
4. Protokol tambahan II tahun 1977 yang Mengatur tentang Perlindungan Korban Sengketa Bersenjata Non-Internasional.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu berupa buku-buku, jurnal, karya ilmiah yang berkaitan dengan pengaturan terhadap serangan *Combat drone (UCAVs)* di wilayah konflik.

c. Bahan hukum tersier

Adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum dan

sebagainya yang dapat di gunakan untuk membantu penulis dalam menulis penelitian ini.¹⁵

3. Teknik pengumpulan data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui sifat kepastakaan atau studi dokumen yaitu mengumpulkan informasi yang diperoleh dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan pendapat para ahli yang ada kaitannya dengan pokok-pokok permasalahan penelitian tersebut.

4. Analisis Data

Analisis Data merupakan suatu proses tindak lanjut pengelolaan data yang merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian dan daya pikir secara optimal.¹⁶ Setelah di peroleh data baik data primer maupun data sekunder, kemudian data tersebut dikelompokkan sesuai dengan jenis data. Data yang telah dikumplkan dan dikelompikan akan di analisis secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan cara penelitian yang menghasilkan deskriptif, dalam pengertian apa yang dinyatakan

secara tertulis.¹⁷ Hasil analisis data ini disimpulkan secara deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus,yang mana dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan mengenai Penggunaan *Unmanned Combat Aerial Vehicle /Combat Drone* dalam perang diatur dalam Hukum Humaniter Internasional

Amerika serikat telah sering melakukan serangan *Combat Drone* (UCAVs) terhadap wilayah timur tengah terutama di *Pakistan*, pemerintah AS bagaimanapun mengklaim bahwa serangan pesawat *Combat Drone* (UCAVs) tidak melanggar kedaulatan pakistan karena pemerintah diizinkan melakukan serangan dengan alasan sebagai moral dan tindakan hukum yang dibenarkan menurut hukum perang berdasarkan *Self Defense* sebagai alasan pembenar untuk mengupayakan

¹⁵ Ashshofa, *Metode Penulisan Hukum*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm 103

¹⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cetakan Ketiga,Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 50

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,UI Press, Jakarta, 1983,hlm 32

keamanan Negara mereka dari ancaman Terorisme dari luar.¹⁸

Pasal 36 Protokol Tambahan I tahun 1977, yang mensyaratkan bahwa : *“Dalam penyelidikan, pengembangan, akuisisi atau penggunaan senjata baru, alat-alat atau cara peperangan, suatu Pihak Peserta Agung berkewajiban menetapkan apakah penggunaannya, dalam keadaan tertentu atau segala keadaan, tidak akan dilarang oleh Protokol ini atau oleh aturan lain dari hukum internasional yang berlaku bagi Pihak Peserta Agung.”* Sebagai metode baru perang, pelepasan rudal oleh pesawat tak berawak yang dikendalikan oleh operator - seringnya kewarga sipil – yang ditempatkan ribuan mil jauhnya seharusnya sudah menjadi sasaran pengawasan ketat oleh negara-negara yang berusaha untuk mengembangkan atau memperoleh *drone*. Setidaknya, kewajiban yang diatur dalam Pasal 36 harus mencakup semua negara yang menjadi anggota Protokol Tambahan I 1977, meskipun, tentu saja, kewajiban umum untuk 'menghormati dan menjamin penghormatan' pada hukum humaniter internasional (HHI)

¹⁸ Harry van der Linden “Drone Warfare and Just War Theory” Chapter 9 Butler University Libraries 2015 hlm.171

harus mempengaruhi setiap negara, apakah itu adalah peserta Protokol atau bukan, untuk melakukan analisis hukum tersebut.

pasal 6 (1) ICCPR¹⁹ menyatakan bahwa *“setiap orang memiliki hak untuk hidup yang tidak dapat dirampas oleh siapapun dan hak tersebut dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat diambil hak hidupnya secara sewenang-wenang.”* Pasal 6(1) Kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik ini secara tegas menyebutkan tidak satupun dalam kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberi hak pada suatu negara, kelompok, atau perorangan untuk melakukan kegiatan yang ditujukan untuk menghancurkan hak-hak dan kebebasan yang diakui dalam kovenan ini, termasuk diantaranya adalah hak untuk hidup berdasarkan pasal 6 tersebut.²⁰

Prinsip proporsional sudah dikodifikasi dalam pasal 51 paragraf 5 huruf b Protokol Tambahan I 1977 konvensi Jenewa dimana bahwa setaip negara

¹⁹ ICCPR adalah International Covenant on Civil and Political Rights(Kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik)

²⁰ Setiawan Wicaksono, “Hambatan dalam menerapkan Pasal 6 kovenan internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik sebagai dasar Penghapusan Pidana Mati di Indonesia” *Pandecta* Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang Vol. 11 No.1 Juni 2016 Hlm.69

dilarang melakukan :“*serangan yang dapat diduga akan menimbulkan kerugian yang tidak perlu berupa korban jiwa orang-orang sipil, luka luka dikalangan orang sipil merusak objek-objek sipil, atau gabungan dari semuanya itu yang merupakan hal yang melampaui batas dibandingkan dengan keuntungan militer yang kongkret dan langsung yang diharapkan sebelumnya.*”²¹

Penggunaan *Combat drone* (UCAVs) seharusnya digunakan secara proporsional dengan tujuan untuk menghindari korban dari pihak sipil proporsionalitas memiliki makna sama dengan Keseimbangan sehingga dalam prinsip ini harus terjadi keseimbangan antara prinsip kepentingan militer, Prinsip kemanusiaan dan Prinsip kesatriaan.²²

B. Dampak Penggunaan Serangan *Combat Drone* (UCAVs) Menurut Hukum Internasional

1. Pelanggaran Terhadap Teori Perang yang Adil (*Just war*)

Penggunaan *Combat Drone* (UCAVs) tersebut belum dapat dikatakan sah karena belum

mendapat persetujuan dari PBB terkait adanya ancaman yang nyata terhadap AS untuk dapat melakukan serangan terhadap Pakistan. Selain itu serangan *Combat Drone* (UCAVs) terhadap *Pakistan* dalam prinsip *just ad bellum* dalam kondisi *Reasonable Of Success* tidak mencapai tujuan yang sebenarnya pada akhirnya tidak menghasilkan apapun selain kekerasan dan kehancuran dikarenakan amerika tidak selalu mengklarifikasikan serangan dan militan yang berhasil dibunuh pasca serangan kepada pemerintah kepada kedua negara maupun kepada media massa, sebaliknya malah Pakistan beserta lembaga kemanusiaan yang mengeluarkan data mengenai pembunuhan akibat serangan dinegaranya.

Prinsip *just in bello* merupakan prinsip yang penting dalam teori *just war* (perang yang adil) dan etika berperang, yaitu moralitas dalam perang berkaitan dengan tindak tanduk atau perilaku benar atau salah dalam mengambil hak hidup seseorang, terlebih dalam Penggunaan *Combat Drone* (UCAVs) yang seharusnya dikembangkan mengikuti konsep *just in bello*. Artinya efek kehancuran akibat perang bias dibatasi dengan memproduksi

²¹ Protokol Tambahan 1 tahun 1977 Konvensi Jenewa pasal 51 paragraf 5 huruf b

²²Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter* ,2007, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

senjata dengan tingkat presisi tinggi sehingga dapat dengan jelas membedakan mana *combatant* dan *non combatant* dalam melakukan serangan.

Namun serangan *Combat Drone* (UCAVs) juga terbukti tidak relevan dengan kondisi diskriminasi yang terdapat pada prinsip *just in bello* bahwa drone sebagai *combatant* robot yang memiliki kemampuan “*sense thick-act*”²³ yaitu kemampuan pendeteksian dan pengidentifikasian untuk membedakan antara target yang dilakukan melalui sensor, yang pada kenyataannya tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menentukan *liability to attack* yang seharusnya dimiliki *combatant* untuk bertindak proporsional dalam membunuh musuh. Bahwa terdapat kesalahan sensoris yang menyebabkan *Combat Drone* (UCAVs) tidak mempunyai presisi dalam serangan dan juga belum lagi apabila terjadi error system yang membuat presisi serangan tidak menjadi akurat bahkan nyasar yang membuat penggunaan *Combat Drone* (UCAVs) tidak

sesuai harapan salah satunya datang dari beberapa kasus serangan terhadap warga sipil yang melakukan kegiatan, serangan terhadap rumah padat penduduk serta bangunan sipil

2. Pelanggaran terhadap prinsip – prinsip hukum humaniter internasional

Prinsip proporsionalitas menuntut para kombatan dapat menentukan sikap saat berperang dengan harus membedakan antara musuh dan warga sipil tak bersenjata. Amerika Serikat yang pada awalnya menggunakan *Combat Drone* (UCAVs) dengan tujuan menekan jumlah korban perang pada akhirnya malah menghasilkan jumlah korban yang sangat banyak dalam perang dronanya termasuk beberapa di antaranya adalah warga sipil. Terdapat cukup banyak kasus mengenai serangan *Combat Drone* (UCAVs) yang dilancarkan Amerika Serikat, Prinsip military necessity memperbolehkan adanya kekerasan dalam menyerang lawan demi mencapai sebuah kepentingan, namun sasaran militer yang dituju harus sesuai dengan aturan HHI. Sasaran militer yang dimaksud adalah orang, tempat atau objek yang turut andil dalam perang yang

²³ Justin Mcclelland “The Review Weapon In Accordance With Article 36 Of Additional Protocol 1 International Review Of The Red Cross Vol. 85 No. 850 Juni 2003 hlm.408-409

sedang terjadi. Dalam konflik bersenjata, satu-satunya tujuan militer yang diperbolehkan adalah untuk melemahkan kapasitas militer lawan. Sedangkan dalam kasus perang *Combat Drone (UCAVs)* yang diciptakan Amerika Serikat di Pakistan, Amerika Serikat bukan hanya menyerang kelompok teroris yang menjadi tujuan militernya. Amerika Serikat tidak hanya melemahkan pergerakan kelompok teroris namun juga melemahkan masyarakat Pakistan bahkan orang-orang yang menurut HHI harus dilindungi dalam perang.

3. Bentuk Pertanggungjawaban Amerika akibat dari serangan *Combat Drone (UCAVs)*

Amerika Serikat memiliki kewajiban dibawah hukum humaniter internasional untuk memastikan Investigasi segera, secara menyeluruh Independen dan tidak memihak dilakukan dalam kasus-kasus yang didokumentasikan dalam laporan ini dan semua serangan lainnya dimana ada alasan yang masuk akal seperti diatas untuk menunjukkan bahwa terdapat pembunuhan yang tidak sah telah terjadi. Jika ada bukti yang cukup diterima, pihak berwenang AS harus membawa mereka yang

bertanggung jawab untuk diadili di pengadilan publik secara adil.

Amerika Serikat dan Pakistan sama-sama memiliki kewajiban untuk menyelidiki kasus ini dimana pembunuhan yang melanggar hukum mungkin saja terjadi untuk menegakkan keadilan. Tetapi amerika bersikeras menolak untuk bertanggung jawab ditambah pakistan yang bersikap ambigu terkait serangan *Combat Drone (UCAVs)* ini membuat hampir mustahil bagi para korban utuk mendapatkan kompensasi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Legalitas Penggunaan senjata *Combat Drone (UCAVs)* diklasifikasikan sebagai melanggar hukum humaniter internasional. *Combat Drone (UCAVs)* bertentangan dengan Pasal 22 *Hague Regulations* Tahun 1907 karena dapat menyebabkan kerusakan yang berlebihan terhadap obyek sasarannya sehingga menyebabkan penduduk baik kombatan maupun non-kombatan terluka bahkan mati. Pasal 23 huruf (e) menyebutkan bahwa para pihak dalam berperang harus memperhatikan prinsip proporsionalitas. Prinsip proporsionalitas ditujukan agar

perang atau penggunaan senjata tidak menimbulkan korban, kerusakan, dan penderitaan, yang berlebihan. Aturan mengenai larangan penggunaan unmanned drones diperjelas di dalam Ketentuan Protokol Tambahan I Tahun 1977 Pasal 35 yang melarang penggunaan senjata, proyektil dan bahan peledak serta metode perang alam untuk menyebabkan luka berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu.

2. Tanggung jawab hukum internasional terhadap serangan drone yang melanggar hukum, baik di tingkat negara dan individu. Sangat sulit untuk menentukan siapa yang harus bertanggung jawab atas tindak pidana ketika warga sipil tewas entah itu karena pelanggaran aturan HHI pembedaan atau proporsionalitas atau pelanggaran hak asasi manusia yang fundamental. Dikarenakan belum adanya aturan Khusus yang mengatur secara rinci tentang penggunaan *Combat drone(UCAVs)*, tidak seperti .penggunaan nuklir sebagai senjata yang telah jelas diatur dalam hukum internasional
3. Dilihat dari sudut positifnya penggunaan sistem *Combat Drone (UCAVs)* seharusnya

akurat dalam menembaki target, keuntungan baik secara benefit atau tidak ada resiko nyawa dari pilot menjadi pertimbangan yang kuat dalam penggunaan pesawat bersenjata tanpa awak ini. Satu hal yang tidak boleh luput adalah penggunaan *Combat Drone (UCAVs)* dalam kekuatan bersenjata haruslah memperhitungkan apakah penggunaannya akan mengakibatkan kerugian terhadap rakyat sipil atau tidak. Namun kenyataannya sangat berbanding terbalik baik secara benefit maupun resiko yang lebih besar.

B. Saran

1. Penggunaan drone sebagai senjata harus dirumuskan dalam suatu atura hukum tertentu. Oleh karenanya negara-negara yang saat ini menggunakan teknologi drone harus bersepakat untuk menetapkan aturan hukum tersebut, sehingga tidak ada kekosongan hukum dalam pengaturan mengenai penggunaan drone tertuma yang berkaitan dengan penggunaannya sebagai senjata dalam konflik bersenjata. Perumusan aturan hukum ini harus juga memperhatikan hukum humaniter internasional. Karena jika tidak segera dirumuskan,

maka sangat sulit bagi negara untuk menentukan batasan-batasan terkait penggunaan senjata tersebut melihat dampak yang dihasilkan sangat buruk dalam bidang kemanusiaan.

2. Penggunaan senjata drone baik di dalam maupun diluar konteks konflik bersenjata, harus mencakup penekanan pada transparansi, akuntabilitas, dan pedoman kebijakan yang tidak ambigu. Mungkin ada kasus tertentu dimana pertimbangan keamanan yang serius mengharuskan adanya tindakan tertentu yang tidak dapat diterima, dengan demikian, situasi ini mengharuskan menjadi pengecualian bagi suatu kebijakan untuk memprioritaskan transparansi dan akuntabilitas dengan melakukan setiap serangan, bersama dengan justifikasi hukum dan politiknya, serta bertanggungjawab pada kerugian sipil yang dihasilkan.
3. Amerika Serikat sebagai negara yang telah berpengalaman dalam melakukan serangan drone berkesempatan untuk membentuk kebijakan senjata *Combat Drone (UCAVs)* yang efektif transparansi dan bertanggungjawab yang menjadi cerminan serta menjadi acuan

PBB dalam membuat aturan tentang penggunaan senjata *Combat Drone (UCAVs)* dimasa depan yang akan ditaati oleh negara anggotanya. selain itu kebijakan tersebut haruslah menghargai hak asasi manusia, tidak bertentangan dengan aturan hukum internasional, serta menghormati kepentingan teritorial negara dengan tidak melanggar nilai-nilai serta prinsip dari suatu negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adolf, Huala Aspek- Aspek Negara dalam hukum internasional, pt. raja grafindo persada, Jakarta
- Amirudin dan Asikin Zainal, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ashshofa, *Metode Penulisan Hukum*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 1996,
- Effendi, Erdianto Penganggulangan Seperatisme Dengan Menggunakan Hukum Pidana, Genta publishing. Yogyakarta 2015
- Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, 2007, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar dalam permanasari arlina, wibowo aji, *Pengantar Hukum Humaniter Internasional* international committee of the red cross, Grafindo persada Jakarta, 1990,

Permanasari, Arlina *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta, 1999,

Pictet, Jean *Development and Principles of International Humanitarian Law*, Martinus Nijhoff Publisher Henry Dunant Institute, 1985,

Siswanto, Arie *Hukum Pidana Internasional*, Pt. raja Grafindo Persada Jakarta

Soekanto, Soerjono dan mamudji, Sri *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 23

Sujatmoko Andrey, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2005,

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1983

Waluyo, Bambang *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2002

B. Jurnal

Additional Protocols to the Geneva Conventions of 12 August 1949 (Geneva, 1977),

Amnesty international *Deadly Assistance: The Role Of European States In US Drone Strikes*, act 30/8151/ 2018

Evi Deliana HZ., "Penegakan Hukum Humaniter Internasional Dalam Hal Terjadinya Kejahatan Perang Berdasarkan Konvensi

Jenewa 1949 " Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNiversitas Riau VOL> @ NO. 1 Februari 2011,

Harry van der Linden "Drone Warfare and Just War Theory" Chapter 9 Butler University Libraries 2015 hlm.171

Justin Mcclelland "The Review Weapon In Accordance With Article 36 Of Additional Protocol 1 International Review Of The Red Cross Vol. 85 No. 850 Juni 2003

United States Departement of Defense, *Dictionary of Military and Associated Terms*, 2001, hlm 563.

C. Website

http://pakistanbodycount.org/drone_attack.php diakses pada 27 november 2019

<https://www.thebureauinvestigates.com/projects/drone-war/data/obama-2012-pakistan-strikes> diakses tanggal 4 april 2019 Targetted Killing ,Council Of Foreign Relation,

[Http://Www.Cfr.Org/Backgrounder/ Targeted-Killings](Http://Www.Cfr.Org/Backgrounder/Targeted-Killings)

<Http://www.cfr.org/background/argeted-killings> diakses Tanggal 6 april 2019

<https://www.voaindonesia.com/a/trump-cabut-perpres-pelaporan-korban-sipil-yang-tewas-dalam-operasi-intelijen/4816917.html> diakses tanggal 08 april 2019